

ABSTRAK

Sudah sejak Konsili Vatikan II, Gereja memberi perhatian yang serius pada masalah-masalah aktual yang terjadi dalam masyarakat (GS 1). Untuk itu, Gereja perlu membuka diri bagi tanda-tanda zaman dan mengartikannya dengan terang Injil (GS 4). Dengan demikian, Gereja meneruskan karya Kristus dalam memberi kesaksian akan kebenaran yang menyelamatkan umat manusia.

Salah satu tanda-tanda zaman tersebut adalah kebangkitan kaum feminis yang ingin memperjuangkan persamaan hak dan martabat wanita. Kaum feminis merasa bahwa martabat wanita tidak dihargai dan hak-hak mereka dibatasi. Mereka melihat bahwa kaum wanita belum dapat mengaktualisasikan diri karena pola hidup masyarakat masih dikondisikan oleh dominasi maskulin (androsentrisme). Dalam kehidupan Gereja, pengalaman tersebut tampak dalam praktek tabhisan imam yang hanya boleh diterimakan kepada kaum pria. Mereka mempersoalkan: Apakah kaum wanita sebagai wanita memang tidak dimungkinkan untuk menjadi imam? Apakah mereka mempunyai halangan-halangan mendasar untuk dapat menjalankan pelayanan imamat? Bagaimana sikap Gereja sendiri terhadap persoalan imam wanita ini?

Mengenai persoalan tersebut, Gereja telah menentukan sikapnya melalui Deklarasi *Inter insigniores* yang dikeluarkan oleh Kongregasi Suci untuk Ajaran Iman pada tanggal 15 Oktober 1976. Dalam Deklarasi ini, Gereja mengajarkan bahwa demi menunjukkan kesetiaan pada teladan Tuhan Gereja tidak mengizinkan kaum wanita ditahbiskan menjadi imam. Ajaran ini didasarkan pada praktek Yesus dan para rasul seperti tercantum dalam Kitab Suci serta praktek dalam Tradisi Gereja yang belum pernah mentahbiskan wanita menjadi imam. Selain itu, juga disampaikan refleksi teologis di sekitar hubungan Kristus dan Gereja, sakramen serta makna persamaan orang-orang yang dibaptis.

Tanggal 22 Mei 1994 ajaran tahun 1976 tersebut ditegaskan kembali oleh Paus Yohanes Paulus II dalam Surat Apostolik *Ordinatio Sacerdotalis*. Menurut Paus, Gereja tidak mempunyai dasar yang kuat untuk mengizinkan wanita ditahbiskan menjadi imam.

Apa yang telah diajarkan Gereja mengenai masalah imam wanita hendaknya dipegang teguh dengan pasti oleh seluruh kaum beriman.

Rupanya, pernyataan Gereja berkaitan dengan masalah imam wanita masih menimbulkan beberapa pertanyaan yang mengundang refleksi kritis lebih mendalam. Pokok-pokok persoalan yang mendapat banyak sorotan antara lain penerapan gagasan *in persona Christi* dalam hidup dan pelayanan imam (khususnya dalam Ekaristi), pemakaian data-data dari Kitab Suci sebagai dasar argumentasi, pemahaman mengenai Tradisi Gereja serta pengambilan sikap terhadap ajaran Gereja. Disadari juga bahwa masalah imam wanita menjadi masalah yang kompleks karena berkaitan dengan persoalan seperti makna simbol dan persamaan martabat dalam fungsi dan peran-peran publik.

Semua persoalan tersebut perlu dimengerti dalam konteks Gereja sebagai masyarakat yang berbeda dari masyarakat lainnya karena Gereja didirikan oleh Tuhan Yesus (LG 5; 9). Jabatan imamat pun pertama-tama dimengerti bukan sebagai status kehormatan atau hak asasi pribadi yang berlaku sama untuk setiap orang, tetapi sebagai salah satu bentuk pelayanan dari karunia Roh Kudus yang bertujuan demi pembangunan jemaat (PO 2). Perbedaan peranan dalam perutusan seluruh Tubuh tidak diartikan sebagai diskriminasi dan ketidakadilan, melainkan wujud dari rencana Allah yang "tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera" (1 Kor 14:33).

Pelayanan imamat yang hanya dijalankan oleh kaum pria juga dimengerti sebagai bagian dari rencana Allah yang mempunyai dasarnya dari praktek Yesus dan para rasul dalam Kitab Suci serta dari praktek hidup Gereja sejak semula (Tradisi). Pemakaian simbol dalam pelaksanaan sakramen juga perlu memperhitungkan aspek historis dari simbol tersebut karena makna setiap simbol terikat oleh konteks tertentu.

Akhirnya, yang paling penting adalah menghidupkan Gereja dengan peranserta kaum wanita, terutama sumbangan pemikiran yang mewakili aspirasi dunia wanita dalam proses pengambilan keputusan, sehingga Gereja semakin mampu menjalankan perutusannya sebagai "upaya penebusan bagi semua orang" (LG 9).

ABSTRACT

Since Vatican II, the Church has been considering seriously current problems arising in the society (GS 1). For that purpose, it needs to be open-minded in dealing with the signs of times and in interpreting them in the light of the Bible (GS 4). That is how the Church continues the work of Christ in testifying the truth that brings salvation.

One of the signs of times is the awaking of feminism that struggles for the equality of women's rights and dignity. The feminist think that their dignity is not respected and their rights are repressed. They realize that women have not been able to perform self-actualization because society's patterns of life are conditioned by male domination (androcentrism). In the Church it can be seen from the fact that only men can be ordained. They wonder: is it really impossible for a woman to be ordained as a priest? Does she possess the fundamental obstacles to perform priesthood services? How does the Church respond to this problem?

In reply to the matter, the Church has declared its opinion in *Inter insigniores* Declaration issued by the Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith on 15 October 1976. In the declaration it teaches that for the sake of its faithfulness in following the examples of God, it does not allow women to be ordained as a priest. The teaching is based on Jesus and the disciples' practices as seen in the Bible and the practices of the Church tradition which never ordains a woman as a priest. It also presents theological reflection on the problem around Christ-Church relationship, the sacraments and the meaning of equality among people baptized.

On 22 May 1994, the declaration was reaffirmed by Pope John Paul II in the Apostolic Letter *Ordinatio Sacerdotalis*. According to him, the Church does not have an adequate foundation to allow a woman to be ordained as a priest. What has been taught by the Church concerning the problem of female priest should be obeyed faithfully by all faith believers.

Seemingly, the Church's statement about female priest still arises some questions which invite deeper critical reflection. The problems attracting much attention, among

others, are the implementation of *in persona Christi* idea in priesthood services (especially Eucharist), the use of biblical data as the bases of the argumentation, the comprehension of the Church tradition and the attitudes toward its teachings. It has also been realized that the problem of female priest becomes a complicated problem because it also deals with the question of the meaning of symbol and the equality of dignity in public roles function.

All of the problems need to be understood in the context that the Church as a society is different from other societies because it is founded by Jesus (LG 5; 9). Even the priesthood position is firstly understood not as a prestigious status or a personal right which is available equally for everybody but as a form of service from the Holy Spirit's gift for the development of the whole Body (PO 2). The different roles in the mission of the whole body are not to be interpreted as a discrimination and an injustice but as a manifestation of God's plan who "does not want chaos but peace (1 kor 14:33).

Priesthood services which are carried out only by men are also understood as a part of God's plan which has its bases on the practices of Jesus and the disciples in the Bible and the practices of the Church from the beginning (tradition). The use of symbol in performing the sacraments also needs to take into account the historical aspects of the symbol since the meaning of every symbol is bound by a certain context.

Finally, the most important thing is to rekindle the Church with the participation of women, especially the contribution of ideas representing woman world's aspiration in the process of decision making, so that it becomes more capable in carrying out its mission an "a redemption effort for everybody" (LG 9).